

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA

Oleh:
WAN PIANTI
NIM. E21112052

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Email: Wanpianti67@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Permasalahan BPJS Kesehatan ini menarik untuk diteliti, mengingat rendahnya partisipasi masyarakat dalam program BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kajian implementasi kebijakan pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ini mencakup empat variabel yang mengalami masalah dalam sosialisasi dan layanan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami tentang kebijakan BPJS Kesehatan. Pada aspek komunikasi, kurangnya kejelasan dari kebijakan BPJS Kesehatan menyebabkan masyarakat berasumsi bahwa untuk apa membayar iuran setiap bulannya jika tidak tahu kapan bisa digunakan dan hak apa saja yang akan mereka dapatkan dari BPJS Kesehatan. Sedangkan pada aspek sumberdaya, yakni kurangnya pegawai BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Selanjutnya aspek pada Disposisi, masalahnya hanya sedikit dan hampir tidak ada masalah, yakni kurangnya insentif kepada pegawai yang berakibat semangat kerja kurang maksimal. Yang terakhir adalah Struktur Birokrasi, yakni dalam struktur birokrasi masalahnya mengenai persyaratan dalam pengurusan BPJS Kesehatan yang masih sulit dipenuhi oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian, komunikasi terkait implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna hendaknya perlu dilakukan secara lebih efektif lagi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Perlu adanya penambahan pegawai BPJS Kesehatan Kecamatan Bunguran Timur dan juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang dianggap penting dan kurang memadai bagi masyarakat dan pegawai BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna perlu memperhatikan insentif para pelaksana kebijakan itu sendiri, dan perlu memperbaiki persyaratan dalam memperoleh pelayanan BPJS Kesehatan.

Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Kesehatan, BPJS

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY NUMBER 24/2011 CONCERNING SOCIAL SECURITY AGENCY IN BUNGURAN TIMUR SUBSDISTRICT OF DISTRICT REGENCY

Abstract

The aim of this research is to identify factors that affect the successful implementation of the health insurance program which is Healthcare and Social Security Agency (BPJS) in Subdistrict of Bunguran Timur, Natuna Regency. The problems concerning BPJS are interesting to study, given the low participation in the program in the Subdistrict of Bunguran Timur, Natuna Regency. This research is a descriptive study with qualitative approach. Study of Implementation of Government Policy Number 24/2011 on Healthcare Social Security Agency (BPJS) in Subdistrict of Bunguran Timur, Natuna Regency consists of four variables which include

problems in socialization and services to the community, so many people did not understand the policy of BPJS. In the field of communication, the lack of clarity of BPJS policy has caused hesitation among the public to pay dues every month. Meanwhile, regarding the resources, there is a shortage of BPJS employees in the subdistrict of Bunguran Timur, Natuna Regency. Further, the aspect with the disposition is only a little and almost no problem at all, namely a lack on incentives to the employees that causes them to work less optimally. Another aspect is related to the bureaucratic structure, namely the requirements in the management of BPJS are still difficult to fulfill by the community. Based on the research, communication regarding in the implementation of the policy in the subdistrict of Bunguran Timur in Natuna Regency should be done more effectively, either directly or indirectly. The need for additional staff at BPJS Bunguran Timur subdistrict and also to provide facilities considered important and inadequate for the public, and to increase the number of the employees at the BPJS in Bunguran Timur subdistrict Natuna Regency. The Bunguran Timur Subdistrict Government of Natuna Regency should pay attention to the incentives of the implementers of the policy itself, and the need to improve the requirements in obtaining services of BPJS.

Keywords: Implementation, Health Policies, BPJS

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang Permasalahan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi setiap hak warga negara untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan yang layak, tidak terkecuali pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Salah satu upaya yakni adanya kebijakan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS terbagi menjadi dua, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Akses Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang dikelola oleh

PT. Jamsostek sejak tanggal 1 Januari 2014.

BPJS kesehatan dibentuk agar bisa memberikan jaminan kesehatan tanpa adanya iuran kepada peserta, tidak membedakan jenis kepesertaan BPJS kesehatan, semua diperlakukan sama, serta pengelolaan yang baik. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan sebenarnya. Kebijakan pemerintah dalam membuat Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan tidak berlangsung dengan baik dan tidak sesuai dengan Undang-Undang didalamnya. Sementara pada saat bersamaan sistem BPJS kesehatan berlaku dengan cara pembayaran premi.

Masyarakat masih ada yang menyingkakan sistem BPJS kesehatan yang dituntut iuran tersebut, kekhawatiran mereka berkaitan dengan masalah iuran yang dimana mereka menginginkan Jaminan Kesehatan gratis dan terpadu yang

semestinya bisa diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin, yang seharusnya bisa mengurangi beban mereka, setidaknya dalam bidang kesehatan saja. Selain masalah tersebut, pengenalan tentang BPJS kesehatan juga belum berjalan dengan semestinya. Contohnya masih banyak masyarakat yang kurang tahu/memahami apa itu BPJS kesehatan?, bagaimana sistem penyelenggaraan BPJS?, bagaimana cara pengurusan kepesertaannya?, banyaknya masyarakat yang mengajukan diri menjadi peserta BPJS ketika sudah dalam keadaan sakit, dan lain sebagainya.

Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang beribu kota di Ranai terdiri dari 6 jumlah kelurahan/desa dengan jumlah penduduk 25.760 jiwa dan 6.922 jiwa Kepala Keluarga (tahun 2014), yang dimana hanya 35% yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur, dengan jumlah 9.016 jiwa.

Kebijakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna baru diwajibkan untuk instansi pemerintah, seperti PNS, Polri/TNI, Veteran, pejuang kemerdekaan dan lain sebagainya. Masyarakat umum belum diwajibkan karena disana masih berlakunya jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan masyarakat belum tertarik untuk menjadi peserta BPJS, yang dimana

kebijakan tersebut harus diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulannya, yang tentu saja masyarakat menolak untuk melakukannya.

Untuk apa menjadi peserta BPJS Kesehatan, sedangkan ada jaminan kesehatan lainnya yang lebih fleksibel dan tanpa ada pungutan setiap bulannya. Dengan adanya tumpang tindih antara BPJS Kesehatan dan Jamkesda tersebut membuat BPJS Kesehatan tidak diminati oleh masyarakat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

A.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan fokus permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan membuat suatu perumusan penelitian yang lebih terarah, maka dapatlah dirumuskan masalah sebagai berikut, yakni Mengapa Proses Implementasi Kebijakan BPJS di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna belum efektif?.

A.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu ingin mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang menyebabkan proses implementasi kebijakan BPJS di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang belum efektif.

A.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan agar dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial.

2. Manfaat Praktis

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berupa fakta-fakta temuan di lapangan dalam meningkatkan daya, kritis dan analisis peneliti sehingga memperoleh pengetahuan tambahan dari penelitian tersebut. Dan khususnya penelitian ini dapat menjadi referensi penunjang yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada unit BPJS Kesehatan di Kabupaten Natuna dalam mengarahkan suatu kebijakan yang tidak melenceng dari undang-undang kesehatan nasional.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Edwards III (dalam Winarno, 2007:174-202) implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

“Tahap pembuatan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan”.

Satu hal yang paling penting adalah implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Nugroho (2014), pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu: (1) Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat?, (2) Ketepatan pelaksana, (3) Ketetapan target implementasi, (4) Apakah lingkungan implementasi sudah tepat?, (5) Tepat proses

Edward III (dalam Subarsono, 2005:90), mengungkapkan agar implementasi kebijakan itu berhasil dan berjalan efektif, ada 4 variabel yang harus

di perhatikan, mencakup: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya, Agustino (2006:150), menjelaskan variabel tersebut sebagai berikut:

1. Komunikasi

Setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus transmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Terdapat 3 indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu: transmisi (penyaluran komunikasi yang akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula), kejelasan (komunikasi yang diterima harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua, dan konsistensi (perintah yang diberikan untuk diterapkan dan dijalankan).

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya dapat berjalan dengan rapi dan baik, yaitu: staf (kecukupan dengan jumlah, keahlian dan kemampuan), informasi (cara melaksanakan perintah dan kepatuhan dari para pelaksana).

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan yaitu harus memiliki

kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah: pengangkatan birokrat (berdedikasi pada kebijakan), dan intensif (memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi).

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah melakukan Standard Operating Procedures (SOPs) dan melakukan fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksana fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2006:634) dipengaruhi oleh isi

kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*content of implementation*).

1. Isi Kebijakan (*content of policy*)

Yaitu apa yang ada dalam kebijakan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. Dalam isi kebijakan terdapat 6 variabel: (a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, (b) Jenis manfaat yang dihasilkan, (c) Derajat perubahan yang diinginkan, (d) Kedudukan pembuat kebijakan, (e) Sikap pelaksana kebijakan, (f) Sumberdaya yang dikerahkan

2. Konteks kebijakan (*content of implementation*).

Yaitu gambaran mengenai bagaimana konteks politik mempengaruhi kebijakan tersebut. Konteks kebijakan ini terdiri dari 3 variabel, yaitu: (a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (b) Karakteristik lembaga penguasa, (c) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

Kebijakan publik sangat berpengaruh terhadap proses jalannya pemerintahan, kebijakan publik berperan sebagai motor utama pergerakan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga kesehatan sebaik-baiknya dan memberi contoh yang baik kepada lingkungan sekitar agar mereka juga ikut menjadi masyarakat yang sehat.

BPJS Salah satu tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat. Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikutan tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan.

Tujuan sebuah negara yaitu menciptakan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya. Dalam hal ini, maka Indonesia membentuk Penyelenggaraan Jaminan Sosial yaitu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Yang dimana tujuan dari institut ini memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) DI Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna menggunakan model implementasi yang dikembangkan George C. Edward III yang berpendapat bahwa "implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi". Selain itu peneliti

memilih menggunakan teori George C. Edward III ini menggunakan 4 faktor tersebut dikarenakan pada penelitian ini terfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan publik, khususnya kebijakan mengenai BPJS Kesehatan yang belum efektif.

C. METODE PENELITIAN

C.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang menggambarkan berbagai fenomena atau realitas situasi dan kondisi pelaksanaan implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

C.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan.

C.3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah pegawai dari kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, pegawai Rumah Sakit rujukan dan masyarakat di Kecamatan Bunguran Timur, dengan teknik purposive yang artinya seseorang yang dijadikan informan

penelitian adalah orang yang memahami dan tidak memahami BPJS Kesehatan. Adapun informan dalam penelitian tersebut terdiri dari:

- 1) Pegawai BPJS Kesehatan Kecamatan Bunguran Timur
- 2) Pegawai RSUD Ranai Kecamatan Bunguran Timur
- 3) Peserta dan bukan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur

Sedangkan Objek penelitian ini adalah Efektivitas Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan dari Unit Pemerintah Kabupaten Natuna, yang kemudian akan dianalisis secara cermat sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

C.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu suatu teknik pengolahan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan dari para narasumber yang diteliti, data yang terkumpul berbentuk gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang Implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yang menjadi pelaksana yaitu BPJS Kesehatan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa belum efektifnya implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yang dimana masih banyak masyarakat Kecamatan Bunguran Timur tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan. Efektivitas menunjukkan pada tingkat seberapa jauh kemampuan melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal sarana dan prasarana serta sumberdaya yang ada.

Peneliti dalam penelitian ini mengambil model implementasi yang dikembangkan George C. Edward III yang berpendapat bahwa “implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi”.

Faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan dari Edward III, dalam penjelasan Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan. Maka peneliti dalam melakukan penelitian ini merumuskan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan

di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

D.1. Komunikasi

Berdasarkan Hasil Penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna masih tidak mengetahui tentang kebijakan BPJS Kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, masih banyak yang tidak memahami apa saja hak dan kewajiban yang didapat. Selain itu, disana masih berlakunya jaminan kesehatan daerah yang sangat berpengaruh serta masyarakat di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Kurangnya sosialisasi yang diberikan membuat masyarakat tidak mudah untuk menerima kebijakan yang baru, walau hal tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Komunikasi kebijakan BPJS Kesehatan bertujuan untuk memperluas informasi mengenai Kebijakan BPJS Kesehatan. Komunikasi kebijakn BPJS Kesehatan tidak hanya dilakukan secara langsung, yakni dari pemerintah Kabupaten, yang kemudian disosialisasikan oleh pihak Kecamatan ke tingkat desa sampai kepada masyarakat secara langsung, namun juga melalui sosialisasi tidak langsung yakni, berupa baleho, pamphlet-pamphlet dan pameran. Sosialisasi yang dilakukan

diharapkan masyarakat sepenuhnya memahami apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajibannya.

Transmisi atau penyaluran informasi yang dilakukan secara baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Apabila dalam transmisi atau penyaluran informasi tersebut terdapat kesalahan transmisi, itu merupakan penyebab utama kegagalan dari suatu implementasi. Kemudian informasi yang disampaikan ialah mengenai bentuk sosialisasi kepada masyarakat dan sekaligus mendata warga sudah/belum memiliki kartu BPJS Kesehatan, tata cara membuat kartu BPJS Kesehatan, persyaratan yang harus dilengkapi, dan hak serta kewajiban peserta BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pegawai BPJS Kesehatan dan pada kenyataan yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dalam BPJS Kesehatan, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan. Salah satu kendalanya adalah calon peserta tidak membawa persyaratan yang telah ditetapkan dalam pendaftaran peserta BPJS Kesehatan, seperti tidak membawa surat kelahiran/akte kelahiran, kartu keluarga, nomor rekening tabungan dan sebagainya. Kendala lainnya yaitu

kurang tahunya masyarakat terhadap kewajiban yang harus dilakukan setiap bulannya, yakni melakukan iuran kepada BPJS Kesehatan dan berapa iuran yang harus dibayar.

Komunikasi (*pentransmisian informasi*) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi. Transmisi/penyaluran informasi yang dilakukan secara baik dapat dilakukan secara baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Apabila transmisi atau penyaluran informasi tersebut terdapat kesalahan, maka implementasi kebijakan tersebut akan mengalami kegagalan.

D.2. Sumberdaya

Sumberdaya utama dalam mengimplementasi kebijakan adalah staf. Dalam implementasi kebijakan kegagalan yang sering terjadi salah satunya disebabkan oleh staf yang kurang mencukupi dan memadai. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, namun dioerlukan pula kecakapan staf dengan keahlian dan

kemampuan yang diperlukan (kompeten) dalam mengimplementasikan kebijakan dan/atau melaksanakan tugas dari kebijakan itu sendiri.

Dalam proses implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna mengalami kendala pada sumberdaya manusia (staf), yang dimana staf BPJS Kesehatan hanya berkisar 4 orang (termasuk kepala BPJS Kesehatan). dan BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur tidak mempunyai struktur organisasi, seperti sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya.

Sumberdaya tidak hanya meliputi sumberdaya manusia (staf), tetapi juga meliputi sumberdaya alat (fasilitas) yang tersedia juga menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Fasilitas merupakan sumberdaya pendukung dalam rangka kelancaran para implementor dalam mengimplementasikan kebijakan.

Selain kurangnya staf, kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya respon atau partisipasi dari masyarakat setempat. Informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang direspon karena informasi yang disampaikan kurang memberikan pemahaman. Masyarakat menganggap bahwa kebijakan tersebut hanya

menguntungkan pemerintah saja, yang dimana masyarakat diwajibkan membayar iuran setiap bulannya, tanpa tahu apa hak yang didapatkan dari kebijakan tersebut.

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam mengimplementasi kebijakan, implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi dan mengerti apa yang harus dilakukan serta wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) implementasi suatu kebijakan tidak akan berhasil baik dan banyak kendala. Bisa di simpulkan bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan melalui perbaikan fisik dan penambahan sarana prasarana, penambahan peralatan dan ketenagaan serta pemberian biaya operasional dan pemeliharaan.

D.3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, yaitu pengangkatan birokrat dan

insentif. Pada dasarnya sikap seorang implementor sangatlah dipengaruhi pula oleh pandangannya dalam proses implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara, permasalahan dari sikap pelaksana kebijakan (disposisi) dalam proses implementasi terdapat sedikit permasalahan yaitu penghasilan pegawai yang masih kurang, sehingga mempengaruhi kesejahteraan pegawai. Pengangkatan birokrat dalam menyelenggarakan tertib administrasi diperlukan sistem dan prosedur kerja yang profesionalisme, komprehensif, dan orientasi pegawai sehingga dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Profesionalisme para pengambil kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan dapat dilihat dari pemberian pelayanan kesehatan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa memperhatikan kepentingan pribadi dan organisasi.

Tingkat insentif, yaitu pemenuhan kepentingan atau kebutuhan dari pribadi (para pelaksana kebijakan) juga harus diperhatikan, karena pada dasarnya setiap kewajiban dalam kerja harus didampingi dengan hak-hak dari hasil pekerjaannya. Jika insentif kurang, maka akan berakibat pada semangat kerja dari pelaksana kebijakan (implementor), yang dimana semangat kerja akan berkurang.

D.4. Struktur Birokrasi

Faktor terakhir yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Meskipun komunikasi berjalan baik, lalu didukung oleh sumberdaya yang mantap, dan diikuti disposisi dari implementor yang baik, namun ketiga faktor tersebut bukan jaminan sebuah kebijakan dapat berjalan efektif dan optimal, karena masih terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Dalam struktur birokrasi ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu melakukan *Standard Operating Procedures* (SOPs) dan melaksanakan *fragmentasi*. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrasi/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, maka kendala struktur birokrasi dalam proses implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna lebih kepada permasalahan yang ada dalam urusan administrasi dalam

mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun syarat administrasi dalam menggunakan kartu BPJS untuk berobat di Rumah Sakit. Tujuan dari kelengkapan administrasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban petugas atas apa yang dikerjakan, bentuk tanggung jawab yang berupa bukti diri dari orang yang dilayani. Kalau bukti diri tidak ada, maka petugas tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan.

Struktur birokrasi pada dasarnya, bagaimana kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara kebijakan tersebut. Meskipun komunikasi telah berjalan baik, lalu didukung oleh sumberdaya yang baik pula, dan diikuti disposisi dari implementor yang baik, jika struktur birokrasi masih terdapat kelemahan maka suatu kebijakan tidak akan berjalan efektif dan optimal.

Dalam struktur birokrasi perlu diperhatikan agar dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik adalah melakukan (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi. SOPs adalah proses penyelenggaraan operasi sesuai dengan standar yang ditetapkan selanjutnya. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai pada unit kerja.

E. SIMPULAN

Ada beberapa simpulan yang dapat peneliti simpulkan berkenaan dengan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna belum efektif. Adapun faktor-faktor yang dimaksud diantaranya sebagai berikut :

1. Komunikasi, kurangnya kejelasan yang diberikan oleh pihak BPJS Kesehatan. Yakni sosialisasi yang dilakukan para pelaksana kebijakan BPJS Kesehatan kepada masyarakat belum efektif, yang dimana sebagian besar masyarakat tidak memahami dengan baik apa saja yang menjadi hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan dan masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang kebijakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
2. Sumberdaya, yang mencakup sumberdaya alat dan sumberdaya manusia yang menyebabkan implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna belum efektif. Sumberdaya manusia yang belum memadai, yaitu hanya memiliki 4 orang pegawai, yang dimana terdiri dari kepala BPJS dan 3 orang staf, dan

tidak memiliki struktur organisasi, seperti pembagian bendahara, sekretaris dan lain sebagainya. sumberdaya alat seperti fasilitas ruang tunggu dan computer sudah tersedia dan cukup memadai.

3. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan dalam proses implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur terdapat sedikit permasalahan, yaitu tingkat insentif para pelaksana kebijakan yang masih kurang, berakibat semangat kerja kurang maksimal.
4. Struktur Birokrasi, berkaitan dengan persyaratan dalam pengurusan BPJS Kesehatan masih sulit terpenuhi bagi semua anggota masyarakat.

F. SARAN

Berdasarkan simpulan penelitian diatas, peneliti dapat memberikan saran-saran terkait dengan implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Adapun saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Sosialisasi terkait implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur

Kabupaten Natuna hendaknya perlu dilakukan secara lebih efektif oleh pihak BPJS Kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi langsung dilakukan melalui penundangan kepada seluruh SKPD, pihak kecamatan dan sampai ke pihak Desa serta kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan pihak BPJS Kesehatan seharusnya tidak dilakukan untuk instansi pemerintah saja, namun juga untuk masyarakat umum. Bentuk sosialisasi tidak langsung berupa baleho, spanduk, dan pamphlet, serta melalui media masa (elektronik dan cetak).

2. Pemerintah Kabupaten Natuna perlu melakukan penambahan pegawai BPJS Kesehatan dan juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang dianggap penting dan kurang memadai bagi masyarakat dan pegawai BPJS di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
3. Pemerintah Kabupaten Natuna perlu memperhatikan tingkat insentif para pelaksana kebijakan itu sendiri.
4. Pemerintah Kabupaten Natuna perlu memperbaiki persyaratan

dalam memperoleh pelayanan
BPJS Kesehatan.

Sugandi, Y.S. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&DI*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta.

Suharto,Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Iplementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Wahab, S.A. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Malang: Rineka Cipta.

_____. 2010. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo: Yogyakarta

_____. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Med Press (Anggota IKAPI).

Jurnal:

Marisah. 2016. *Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Penyelenggara Jamninan Sosial Kesehatan No.1 Tahun*

G. REFERENSI

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ali, F., and Alam, A.S. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Danim, S. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Islamy, M Irfan. 2001. *Seri Policy Analysis*. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang.

Muhadji, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Nugroho, R. 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

_____. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia.

Purwanto, Dyah, R.S. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gaya Media.

Salim,Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

2014 *Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Shadikin. 2014. *Implementasi Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.

Skripsi:

Dicky Kusumaatmaja, 2013, *Implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau*.

Fera Wahyuni 2012, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah kota Balikpapan*.

Internet:

http://www.researchgate.net/publicliterature/PublicLiteratureDetails.requestFulltext.html?pubid=42356358&fulltextRequested=1&account_firstname=wengky&accountastname=saputra&account_email=wengkysaputra%40gmail.com&fullTextYes=Sign+Up
update pukul 08.45 tanggal 20 Maret 2015



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : WAN PIANTI
 NIM / Periode lulus : E21112052 / 2016 / 2017
 Tanggal Lulus : 13 JANUARI 2017
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / IA
 Program Studi : IAN
 E-mail address/ HP : wanpianti67@gmail.com / 081350470767

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa WAN PIANTI (*) pada Program Studi IAN Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Kebijakan pemerintah Nomor 24 Tahun 2011
 tentang Badan Penyelenggara jaminan sosial Di Kecamatan
 Bunguran Timur Kabupaten Natuna

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

Secara *fulltext*

content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 02 Maret 2017

Handwritten signature
 Wan Pianti
 NIM. E21112052

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)